

BAB II

KAPITALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERKEMBANGAN FEMISNME DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai kapitalisasi kegiatan pemberdayaan perempuan serta gerakan feminisme yang selama ini telah diperjuangkan oleh perempuan di Indonesia. Pembahasan ini tidak luput dari *historical situatedness* yang digunakan untuk melihat bagaimana peneliti mengamati dan menelaah perkembangan pemberdayaan perempuan dan gerakan feminisme pada konteks sejarah, sosial budaya, ekonomi, politik sehingga kemudian dapat menunjukkan kaitannya dengan topik pada penelitian ini.

2.1. Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Lebih dari satu dekade terakhir, isu gender telah menjadi fokus perhatian di Indonesia, dipicu oleh gerakan global yang menyoroti ketidakadilan terhadap perempuan. Gerakan feminisme, yang mempertanyakan legitimasi struktur dan sosial budaya atas peran domestik dan publik perempuan, telah mencerminkan kesadaran akan persoalan ini. Ranah domestik dan publik dipermasalahkan karena perempuan mengalami subordinasi dan marginalisasi, yang berpangkal pada pembagian kerja berbasis gender (Shalihin & Firdaus, 2019).

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang secara epistemologi pemberdayaan memiliki arti kekuatan atau kemampuan, yang kemudian dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang belum berdaya (Nur, 2019). Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan suatu proses dan usaha untuk

memberikan atau meningkatkan kekuatan, kemampuan, serta daya kepada individu maupun kelompok yang rentan, sehingga mereka mampu mengenali, menganalisis, dan menentukan kebutuhan, potensi, serta permasalahan yang dihadapi. Selain itu, pemberdayaan juga mendorong mereka untuk memilih solusi terbaik dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan sendiri dapat dilihat sebagai suatu program maupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program dapat dimaknai sebagai tahapan – tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan, pemberdayaan sebagai suatu proses relatif berlangsung terus – menerus sepanjang kehidupan manusia, diperoleh melalui pengalaman pribadi, dan bukanlah proses yang berhenti pada satu titik waktu tertentu (Nur, 2019). Hal ini juga berlaku pada masyarakat, dimana pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah, melainkan proses tersebut terus berlangsung selama komunitas atau masyarakat itu sendiri masih ada dan terus berusaha memberdayakan dirinya.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses penguatan kapasitas dan kesadaran kritis untuk memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dalam pengawasan, pengambilan keputusan, serta transformasi sosial yang mendukung tercapainya kesetaraan gender secara substantif antara perempuan dan laki-laki (Nadia, 2022). Isu terkait pemberdayaan perempuan ini sangat penting untuk dibahas karena kita berada di titik simpang yang dapat membawa posisi perempuan ke dua arah yang berlawanan, meskipun negara ini telah meyakini modernisasi

yang cepat dan kemajuan yang signifikan oleh perempuan dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja, namun norma budaya, agama, dan sosial masih membatasi perempuan untuk tetap berada di ranah domestik, karena status tinggi perempuan dikaitkan dengan hak istimewa mereka untuk tinggal di rumah (Sohn, 2015).

Perjalanan sejarah pemberdayaan perempuan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa fase penting, yakni periode awal yang dimulai dari masa perjuangan Kartini hingga kemerdekaan tahun 1945; dilanjutkan dengan fase pasca-kemerdekaan sampai tahun 1965; masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998; serta era reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 hingga saat ini (Floretta, 2020).

Gagasan emansipasi yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini pada awal abad ke-20 menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai hak-hak perempuan di Indonesia. Meskipun Kartini tidak secara langsung membentuk organisasi perempuan, pemikirannya mengenai pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender telah mendorong lahirnya gerakan perempuan yang lebih terorganisir pada masa berikutnya. Semangat tersebut kemudian terejawantahkan dalam pendirian organisasi perempuan pertama di Indonesia, yaitu Poetri Mardika pada tahun 1912, yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan pembelaan hak-hak perempuan pribumi (Floretta, 2020). Organisasi ini menjadi titik awal institusionalisasi perjuangan perempuan di ranah publik, yang terus berkembang seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik.

Kebangkitan gerakan perempuan pada masa kolonial semakin terasa di tahun 1928-1930 dimana marak tumbuh organisasi perempuan. Tercatat pada tahun 1928 terdapat 30 organisasi, diantaranya Peserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudian berganti nama menjadi Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) (Hidayati Djoeffan, 2001). Tonggak sejarah terpenting pada era ini adalah bersatunya gerakan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan I yang berlangsung di Yogyakarta dengan pembahasan meliputi hak – hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan (Paramayana, 2017). Sementara pada Kongres ke-2 PPII di tahun 1930 mengangkat persoalan mengenai perdagangan perempuan dan anak.

Namun, perkembangan organisasi perempuan sempat mengalami kemundura pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Hal ini dikarenakan pemerinah militer Jepang melarang seluruh bentuk organisasi perempuan yang telah ada, kecuali Fujinkai, yaitu organisasi resmi yang dibentuk oleh pihak Jepang dan beranggotakan istri – istri pegawai negeri (Floretta, 2020). Kegiatan yang dilakukan Fujinkai lebih bersifat sosial seperti upaya pemberantasan buta huruf. Meskipun kegiatan tersebut terkesan positif, namun tujuan di dirikannya Fujinkai sejatinya tidaklah dilandasi oleh semangat pemberdayaan perempuan, melainkan semata – mata untuk memihak dan mendukung kemenangan Jepang (Hidayati Djoeffan, 2001).

Pasca-kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dinamika gerakan perempuan kembali mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam semangat membangun bangsa yang baru merdeka, berbagai organisasi perempuan bermunculan kembali

dengan misi yang beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan ekonomi. Salah satu organisasi yang menandai era ini adalah Gerakan Wanita Sedar (GERWIS), yang didirikan pada tahun 1950 (Floretta, 2020). Organisasi ini lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan nasional serta perlunya wadah perjuangan yang lebih terorganisir pasca kolonialisme. Dua tahun setelah pendiriannya, GERWIS berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) pada tahun 1952, menandai perluasan basis massa dan agenda perjuangannya.

GERWANI tidak hanya berfokus pada isu-isu domestik atau kesejahteraan perempuan semata, tetapi dikenal sebagai organisasi perempuan yang revolusioner (Darwin, 2004). GERWANI berfokus untuk membawa perempuan ke ranah publik melalui advokasi atas isu-isu struktural seperti ketimpangan sosial, pendidikan, dan keterlibatan dalam politik (Hidayati Djoeffan, 2001). Keberadaan GERWANI menjadi representasi penting dari artikulasi suara perempuan Indonesia yang lebih progresif dan terstruktur pada masa itu. Namun demikian, dinamika politik yang terjadi pada periode berikutnya akan memengaruhi keberlangsungan dan citra organisasi ini secara signifikan, hal ini disebabkan karena adanya pergeseran pada isu yang disuarakan menjadi masalah sosial dan lebih fokus pada perwujudan sistem sosialisme lebih dulu sebelum bicara masalah spesifik mengenai urusan perempuan (Floretta, 2020). Gagalnya organisasi perempuan dalam hal ini sempat memunculkan rasa kekecewaan yang mendalam dari aktivis perempuan ketika itu (Darwin, 2004).

Memasuki era Orde Baru dikenal juga sebagai era kooptasi organisasi masyarakat, yang mana organisasi perempuan juga menjadi korban kooptasi negara dimana kembali mengalami pengekan dengan politik wadah tunggal (Darwin, 2004). Hilangnya otonomi organisasi perempuan pada masa Orde Baru berdampak signifikan terhadap penyempitan ruang gerak mereka dalam menentukan arah perjuangan secara bebas dan mandiri. Mereka seolah – olah mati bahkan dimatikan dengan munculnya organisasi – organisasi bentukan pemerintah seperti Dharma Wanita yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol partisipasi perempuan secara simbolik namun tidak substantif (Paramayana, 2017).

Organisasi-organisasi perempuan yang beroperasi di bawah kontrol negara pada masa Orde Baru secara sistematis mereproduksi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam peran domestik yang subordinatif. Melalui berbagai mekanisme ideologis dan institusional, negara mempromosikan citra perempuan sebagai pelengkap laki-laki dengan fungsi utama sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Pandangan ini tercermin dalam idiom-idiom budaya yang diarusutamakan oleh negara, seperti *macak*, *manak*, *masak* (berhias, melahirkan, memasak), *manut ing pandum* (tunduk pada nasib atau kehendak), dan *konco wingking* (pendamping di belakang), yang secara simbolik mengukuhkan posisi perempuan di ranah privat serta menghambat peran aktif mereka di ranah publik dan politik (Paramayana, 2017).

Dengan demikian, organisasi-organisasi tersebut tidak hanya gagal menjadi agen pemberdayaan, tetapi justru berfungsi sebagai instrumen domestifikasi perempuan yang melanggengkan struktur patriarki dalam tatanan sosial dan

kebijakan negara. Hal ini berlangsung selama 32 tahun dan selama itu pula keterlibatan perempuan dalam birokrasi dan proses pembangunan mengalami pembatasan yang signifikan. Alih – alih diberdayakan sebagai aktor aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, perempuan justru cenderung diposisikan sebagai alat politik yang dimobilisasi untuk mendukung legitimasi kekuasaan rezim yang berkuasa.

Meskipun demikian, keterbatasan ruang gerak yang dialami perempuan Indonesia pada masa itu tidak sepenuhnya menghilangkan daya kritis mereka. Di balik struktur sosial yang membatasi, tetap muncul individu – individu perempuan yang menyadari hak – hak nya dan menunjukkan sikap reflektif terhadap ketimpangan yang ada.

Memasuki era Reformasi di tahun 1998 hingga sekarang, dinamika pemberdayaan perempuan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang demokratisasi yang lebih luas, termasuk bagi gerakan perempuan. Reformasi membuka peluang bagi lahirnya berbagai organisasi dan inisiatif yang fokus pada advokasi hak-hak perempuan, partisipasi politik, serta penguatan kapasitas perempuan di berbagai sektor. Selain itu, negara mulai merespons tuntutan kesetaraan gender dengan merumuskan kebijakan-kebijakan afirmatif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Wibawana, 2022). Regulasi ini kemudian menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan domestik serta menunjukkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak – hak dasar perempuan. . Meskipun tantangan struktural masih ada,

era Reformasi menjadi titik balik penting dalam perjalanan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Meskipun sejarah panjang pemberdayaan perempuan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak dan posisi perempuan di berbagai sektor, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah kecenderungan pemberdayaan perempuan yang mengalami pergeseran makna dan fungsi, dari sebuah gerakan sosial dan politik menuju komodifikasi dalam sistem ekonomi pasar. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan tidak jarang dimanfaatkan sebagai alat kapitalisasi oleh berbagai aktor baik negara, lembaga internasional, maupun korporasi yang justru berisiko mereduksi makna substantif dari pemberdayaan itu sendiri.

2.2. Kapitalisasi Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Kehadiran globalisasi dan sistem ekonomi pasar bebas telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Salah satu dampak yang mencolok dari transformasi ini adalah ketika negara – negara berkembang mulai membuka diri terhadap arus kapitalisme global saat ini, yang pada akhirnya memposisikan wilayah – wilayah tersebut sebagai jalan strategis untuk memperluas jaringan distribusi dan pemasaran produk – produknya secara masif.

Dalam kerangka ekonomi global, pasar tidak hanya diposisikan sebagai sebuah ruang transaksi semata, tetapi juga diyakini memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Namun, perlu disadari bahwa pesatnya perkembangan pasar dan meluasnya praktik perdagangan bebas tidak hanya memberikan dampak yang signifikan dalam dimensi ekonomi, melainkan juga turut menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang signifikan. Di tengah dominasi kapitalisme global, pasar tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pertukaran barang dan jasa, melainkan juga menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi dan bahkan menentukan aspek kehidupan manusia, di mana pasar memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu menjadi objek komoditas yang tunduk pada logika komersial semata.

Pada sistem kapitalisme, media promosi seperti iklan baik yang tersebar melalui media cetak maupun media elektronik berfungsi sebagai alat strategis yang digunakan untuk merekonstruksi nilai – nilai dalam budaya konsumsi masyarakat agar selaras dengan kepentingan pasar. Transformasi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan perubahan sosial, karena tanpa adanya perubahan sosial, kapitalisme akan menghadapi tantangan dalam memperluas pangsa pasarnya. Dalam konteks globalisasi ekonomi, perubahan sosial menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, karena hanya dengan melalui perubahan sistem nilai dan membentuk budaya konsumtif baru, masyarakat akan terdorong untuk terus mengkonsumsi produk – produk hasil industri (Shalihin & Firdaus, 2019). Dengan kata lain, keberlanjutan kapitalisme sangat bergantung pada kemampuannya dalam merekonstruksi norma sosial dan serta menciptakan kebutuhan – kebutuhan baru melalui pembiasaan masyarakat terhadap pola hidup konsumtif.

Transformasi budaya konsumsi yang terjadi melalui media promosi seperti iklan di televisi maupun majalah telah menjadi salah satu instrumen utama bagi

kapitalisme dalam mendorong tumbuhnya konsumerisme. Sistem kapitalisme secara startegis membentuk dan memasarkan citra gaya hidup modern yang dikaitkan dengan simbol -simbol kebahagiaan yang ditampilkan dalam bentuk visual dan narasi yang menarik, sehingga iklan tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi produk melainkan juga sebagai alat yang mempengaruhi hasrat dan persepsi masyarakat mengenai konsumsi (Shalihin & Firdaus, 2019). Dalam proses ini keinginan – keinginan dipengaruhi, aspek penampilan dan gaya hidup personal mendapatkan penekana yang sangat besar, sedangkan nilai – nilai moral dan pertimbangan etis kerap kali dikesampingkan. Alhasil, gaya hidup konsumtif diposisikan bukan lagi sebagai pilihan, melainkan sebagai norma sosial yang dianggap wajib untuk diikuti dimana hampir seluruh aspek kehidupan dihubungkan dengan gaya hidup tersebut (Subandy dalam Shalihin & Firdaus, 2019).

Melalui strategi promosi yang masif dalam media, konsumen secara perlahan diarahkan untuk membentuk ketergantungan terhadap produk tertentu. Hal ini dikarenakan media periklanan difungsikan sebagai alat utama dalam mengontrol ideologi pasar dan menciptakan ilusi bahwa kehidupan sehari – hari akan terasa tidak lengkap tanpa adanya konsumsi atas barang – barang yang dipromosikan (Shalihin & Firdaus, 2019). Hampir semua media dalam konteks ini berperan penting dalam kapitalisme dalam menyebarkan gaya hidup konsumtif yang menekankan aspek seperti kecantikan fisik, penampilan, kepemilikan barang mewah, dan simbol – simbol status sosial lainnya.

Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam konteks ini sebagai alat untuk menyebarkan gaya hidup konsumtif yang menekankan pada

aspek – aspek keseperti kecantikan fisik, penampilan, kepemilikan barang mewah, dan simbol – simbol status sosial lainnya. Karena keberhasilan kapitalisme sangat bergantung pada kekuatan media massa dalam menyampaikan pesan – pesan konsumsi, maka industri media massa pun berkembang tidak hanya sebagai penyedia informasi melainkan juga harus memenuhi standar dan logika yang berlaku dalam industri kapitalisme (Shalihin & Firdaus, 2019). Media massa tidak hanya menyajikan produk budaya melainkan juga membentuk selera, preferensi, dan kesadaran masyarakat melalui produk budaya yang disajikan.

Dalam sisten ekonomi pasar, kapitalisme telah merambah ke seluruh aspek kehidupan untuk dijadikan komoditi karena adanya kebebasan transaksi. Kebebasan transaksi ini tidak hanya terjadi antara barang atu produk antar negara maupun antar budaya, melainkan juga mulai memperluas dan menyentuh ranah privat sekalipun, menjadikannya bagian dari proses produksi dan konsumsi dalam kerangka ekonomi global (Shalihin & Firdaus, 2019). Dalam hal ini, perempuan kerap kali dijadikan sebagai komoditi dalam menrik konsumen.

Terdapat beberapa alasan mengapa sistem kapitalisme memilih perempuan sebagai salah satu komoditi dibandingkan dengan laki – laki. Pertama, persentase perempuan lebih tinggi sebagai konsumen produk kapitalis dibandingkan dengan laki – laki. Kedua, perempuan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan pola konsumsi. Ketiga, perempuan telah dikonstruksi oleh sosial budaya sebagai manusia yang lembut dan penyayang. Stereotipe inilah yang kemudian secara otomatis memposisikan perempuan pada posisi subordinan yang lemah, penurut sehingga dianggap tidak etis jika menentang struktur sosial budaya yang

telah lama ada. Keempat, karena rata – rata perempuan dianggap lebih mahir dalam menarik konsumen, terutama konsumen laki – laki (Shalihin & Firdaus, 2019)

Upaya dalam memperjuangkannya kesetaraan gender yang sejatinya dimaksudkan untuk membebaskan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi menuju kesetaraan dan egaliterisme, dalam konteks ekonomi pasar bebas justru telah mengalami pergeseran makna. Alih – alih mendukung agenda pembebasan tersebut, kapitalisme justru mereduksinya menjadi instrumen untuk mengeksploitasi perempuan dalam bentuk yang lebih halus namun berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, kapitalisme justru memperluas pengaruhnya melalui mekanisme pasar yang dominan. Melalui media massa terutama iklan, kapitalisme telah merubah budaya konsumsi masyarakat dan membentuk gaya hidup yang seolah – olah menjadi standar sosial baru dalam masyarakat. Akibatnya, nilai – nilai pemberdayaan berpotensi mengalami pergeseran dari tujuan transformatif menjadi simbol semata yang digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Di Indonesia sendiri fenomena kapitalisasi pemberdayaan perempuan mulai terlihat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu kesetaraan gender dalam wacana publik, media, dan strategi pemasaran. Banyak program, kampanye, atau bahkan kebijakan yang mengatasnamakan pemberdayaan perempuan namun dalam praktiknya justru lebih cenderung menampilkan citra semu tanpa memberikan ruang aktual untuk transformasi struktural. Representasi perempuan dalam media atau iklan seringkali hanya digunakan untuk menarik simpati pasar, bukan sebagai bentuk pengakuan atas kapasitas dan hak – hak perempuan secara

substansif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan telah mengalami pergeseran dari yang awalnya sebagai sebuah proses kritis dan kolektif menjadi sebuah komoditas yang dapat dikemas dan dijual sesuai dengan kepentingan kapitalisme.

Tubuh perempuan telah direduksi menjadi piranti untuk dijadikan komoditi, hal ini dikarenakan perempuan dianggap telah ditakdirkan sebagai individu yang indah dan mempesona sehingga kapitalis dengan cerdik menggunakan perempuan untuk mengembangkan usaha mereka (Syamsudin, 2006). Selain itu, iklan sendiri bukanlah sebuah wadah yang netral dari kepentingan kapitalis yang mana di dalamnya mencitrakan perempuan sebagai makhluk yang ideal dengan tampilan yang menarik seperti berkulit putih, mulus, dan bertubuh seksi.

Melalui logika – logika tersebutlah yang kemudian membentuk realitas objektif perempuan untuk mencirikan mereka seperti figur yang di dambakan. Steretotipe gender yang dipersuasikan melalui televisi, film, dan iklan tidak hanya mencerminkan tetapi juga berpotensi memperkuat norma – norma sosial yang ada dan seringkali merugikan perkembangan kesetaran gender (Supiandi, 2025).

Tubuh yang semula sangat bersifat pribadi yang mana pemiliknya memiliki kebebasan mutlak akan hal tersebut, kini telah menjadi publik karena masuknya kapitalisasi ke ranah privat. Kapitalisme menganggap tubuh sebagai sebuah aset dan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ironisnya, banyak perempuan yang terbelenggu dengan citraan ini dan justru merasa bahwa mereka berada di dalam dunia yang empirik dan nyata bahkan mereka lebih merasa menemukan eksistensinya dalam kondisi tersebut.

Bagi perempuan dalam gelombang ekstetisasi, tubuh merupakan aset ekonomi yang punya nilai jual, melalui tubuh juga perempuan memiliki basis *bargaining position* yang tinggi terhadap kekuasaan (Shalihin & Firdaus, 2019). Sehingga semakin indah tubuh seorang perempuan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Artinya semakin indah dan ideal tubuh tersebut, maka semakin tinggi nilai tawar dan nilai tukar sosial serta ekonomi yang diperoleh.

Proses estetisasi yang dijalankan dalam kerangka kapitalisme secara tidak langsung menjadikan tubuh perempuan sebagai objek eksploitasi. Tubuh perempuan kerap ditampilkan dengan menonjolkan bagian – bagian tertentu yang dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan pemasaran produk, sehingga tubuh itu sendiri secara tidak langsung telah menjadi medium produksi (Shalihin & Firdaus, 2019). Di sisi lain, perempuan juga diposisikan sebagai target utama pasar baik sebagai konsumen langsung maupun sebagai perantara dalam membentuk pola konsumsi dan gaya hidup baru.

Akibatnya, perempuan secara sistematis tersegmentasi ke dalam segmen gaya hidup yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih serius, dimana solidaritas antarsesama perempuan dapat melemah. Alih – alih terbebas dari dominasi laki – laki, perempuan justru tanpa sadar mensubordinasikan perempuan lain dan dirinya sendiri ke dalam struktur – struktur yang didominasi oleh laki – laki dan berbagai institusi sosial seperti keluarga, pasar, negara, dan media massa.

Dari sudut pandang ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan telah mengalami perubahan dan kehilangan

hubungannya dengan upaya membebaskan perempuan dari diskriminasi dan penindasan. Sebaliknya, justru menciptakan bentuk penindasan baru bagi perempuan dalam bentuk eksploitasi yang disajikan dengan citra yang ramah dan dihiasi dengan nilai – nilai kemanusiaan. Namun, realitanya proses tersebut menyimpan kekejaman yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh proses ideologisasi terhadap simbol – simbol globalisasi, perdagangan bebas, dan isu gender yang kemudian direduksi oleh kapitalisme guna menciptakan keuntungan sebanyak mungkin melalui mekanisme pasar untuk kelangsungan eksistensinya.

2.3. Rifka Annisa *Women's Crisis Center*

Di tengah meningkatnya kompleksitas isu – isu gender di era kontemporer- mulai dari kekerasan berbasis gender, ketimpangan akses terhadap sumber daya, hingga komodifikasi identitas perempuan dalam logika pasar bebas, maka upaya pembedayaan yang berlandaskan prinsip keadilan menjadi semakin penting dan mendesak untuk diwujudkan. Kapitalisasi atas pemberdayaan perempuan yang dibahas pada sub bab sebelumnya telah menunjukkan bagaimana semangat emansipasi kerap kali direduksi hingga menjadi instrumen ekonomi yang justru mempertajam subordinasi dan segmentasi sosial yang dialami oleh perempuan. Dalam konteks inilah, kehadiran organisasi masyarakat sipil seperti Rifka Annisa *Women's Crisis Center* menjadi hal yang sangat penting.

Keprihatinan terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan serta minimnya layanan yang berpihak pada korban telah menjadi latar belakang lahirnya Rifka Annisa di tengah – tengah masyarakat. Rifka Annisa hadir sebagai inisiatif lokal yang kemudian tumbuh menjadi pionir dalam advokasi dan pendampingan

perempuan di Indonesia. Melalui pendekatan yang integratif dan berbasis kesetaraan gender, lembaga ini berupaya untuk mengembalikan makna sejati dari pemberdayaan perempuan – yakni membangun kesadaran kritis, memperjuangkan hak, dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Rifka Annisa merupakan Women's Crisis Center pertama di Indonesia yang berfokus dalam memberikan layanan komprehensif, mengembangkan mekanisme rujukan, dan membangun forum multistakeholder untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Rifka Annisa yang berarti “Teman Perempuan” ini merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan pada 26 Agustus 1993, yang diinisiasi oleh beberapa aktivis perempuan seperti Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan.

Rifka Annisa hadir karena keprihatinan yang mendalam pada kecenderungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi di sisi lain memperlemah posisi perempuan. Akibatnya, perempuan rentan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual. Pada masa awal pendiriannya, permasalahan kekerasan perempuan masih dianggap wilayah privat dan tabu untuk dibicarakan sehingga tidak ada upaya dan wadah bagi penanganan korban kekerasan. Rifka Annisa hadir mendobrak tabu untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, membangun mekanisme perlindungan komprehensif multi stakeholder, dan memberikan edukasi kepada berbagai pihak untuk memahami dan mengembangkan upaya pencegahan bersama.

Rifka Annisa memiliki pengalaman panjang dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan pendekatan yang memaksimalkan potensi dan mengurangi kerentanan baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki. Komitmennya terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, membuat Rifka Annisa terus menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender melalui berbagai upaya edukasi, kampanye, pelatihan, workshop, maupun penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, kepada berbagai pihak termasuk komunitas masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan instansi perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, Rifka Annisa mengedepankan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia yang berfokus pada perspektif korban, serta mendorong keterlibatan laki – laki sebagai bagian dari solusi. Kini, Rifka Annisa terus mengembangkan diri menciptakan berbagai inovasi dan menjadi pusat sumber daya penghapusan kekerasan berbasis gender.

Sebagai organisasi yang lahir dari keprihatinan atas maraknya kekerasan terhadap perempuan serta minimnya dukungan institusional bagi para korban, Rifka Annisa tidak hanya hadir sebagai pusat layanan melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen ini kemudian diwujudkan secara lebih terstruktur melalui rumusan visi dan misi yang menjadi dasar pijakan seluruh aktivitas dan strategi kerja lembaga. Rifka Annisa memiliki visi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender dan tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal (Rizkiyah et al., 2019).

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi tersebut, ada beberapa langkah yang diambil Rifka Annisa seperti mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk di dalamnya anak – anak, lanjut usia, dan disabilitas, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan (Rizkiyah et al., 2019).

Oleh sebab itu, Rifka Annisa membagi perannya ke dalam beberapa divisi strategis yang saling terintegrasi. Divisi – divisi ini meliputi Divisi Pendampingan yang bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan baik psikologis, hukum, maupun psikososial dan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Divisi MEL & KM (*Monitoring Evaluasi, Learning and Knowledge Management*), yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola berbagai pengetahuan ke seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi, serta mengelola media Rifka Annisa sebagai media penyampaian dan penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat. Divisi Fundraising, yang bertanggung jawab untuk mendukung operasional kegiatan Rifka Annisa serta mengelola dan merawat aset lembaga untuk mendukung pemenuhan logistik internal lembaga.

Sebagai organisasi yang membela perempuan, Rifka Annisa menggunakan kerangka kerja ekologis (*ecological framework*) untuk memahami penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan memetakan perencanaan organisasinya, dimana kerangka kerja ini terdiri dari lima lingkaran konsentris yang

saling berhubungan satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam gambaran umum lembaga, lingkaran pertama dan yang paling mendasar pada kerangka ekologis adalah riwayat biologi dan personal yang dibawa masing-masing individu ke dalam tingkah laku dalam suatu hubungan.

Lingkaran kedua merupakan konteks yang paling dekat di mana kekerasan acap kali terjadi, yaitu keluarga atau kenalan dan hubungan dekat lainnya. Lingkaran ketiga adalah institusi dan struktur sosial, baik formal maupun informal, di mana hubungan tertanam dalam bentuk pertetanggaan, di tempat kerja, jaringan sosial, dan kelompok kemitraan. Lingkaran keempat adalah lingkungan ekonomi dan sosial, termasuk norma-norma budaya dan sistem hukum negara. Sedangkan lingkaran paling luar adalah lingkungan ekonomi dan sosial global, institusi dan struktur sosial global, jaringan global dan kelompok kemitraan bilateral atau global.

Kerangka kerja ekologis inilah yang menjadi landasan gerakan Rifka Annisa dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan sosial gender (*social-gender justice*). Dalam rangka tersebut lingkaran pertama dan kedua melingkupi intervensi layanan individu dan keluarga yang bersifat mikro, lingkaran ketiga merupakan upaya pencegahan melalui pengorganisasian masyarakat dan institusi daerah, sedangkan lingkaran keempat dan kelima merupakan bentuk advokasi yang diupayakan Rifka Annisa dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan (Rizkiyah et al., 2019).

Meskipun Rifka Annisa bukan organisasi pemerintah, sebagai lembaga yang berdiri sendiri Rifka Annisa juga menerapkan strategi keberlanjutan program melalui pendanaan mandiri. Salah satu upaya tersebut adalah pengelolaan *guest*

house yang berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan. Keuntungan dari operasional *guest house* digunakan untuk mendukung berbagai program Rifka Annisa, khususnya yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Sebagian besar pendapatan dari *guest house* disalurkan untuk membantu perempuan korban kekerasan, termasuk layanan konseling, pendampingan hukum, dan program rehabilitasi. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, Rifka Annisa dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari donor eksternal, sehingga meningkatkan kemandirian finansial.

Meskipun Rifka Annisa memiliki kapasitas untuk menjalankan pendanaan secara mandiri, namun mereka tetap membuka diri terhadap kerja sama strategis dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari komitmennya untuk memperluas jangkauan, memperkuat dampak program, dan memastikan keberlanjutan perjuangan dalam mewujudkan keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa mitra yang pernah melakukan kolaborasi bersama Rifka Annisa antara lain :

Tahun	Program	Mitra/Donor
2024	Pengadaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Analis SPHPN Melalui Tematik KDRT Periode Mei – Juli 2024 dengan total dana Rp 150.150.000	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta 10110

	PROGRAM BERDAYA (2022-2023) Improvement of the Access to Legal and Social Services for Women in Papua Periode : Juli 2024 – Juli 2026	The Asia Foundation
2023 – 2024	First Responder Training for cases of sexual violence in the work/company environment	Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (ICBWE) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL)
	Respectful Workplace Policy Training	PT Semen Indonesia Group.
	Training on Preventing and Handling Cases of Violence in the Company Environment	PT Dharma Satya Nusantara Group
	Women's Leadership Guidance	Ministry of the Empowerment of Women and Perempuan and Protection of Children (KPPPA) by PPSW

	Gender and Freedom of Religion and Belief (KBB) (Period: October 2023 – February 2024)	Indika Foundation
--	--	-------------------

Tabel 2. 1 Daftar Mitra Rifka Annisa

2.4. Sejarah Perkembangan Feminisme

2.4.1. Sejarah Feminisme di Dunia

Feminisme pertama kali lahir di Barat pada akhir abad ke – 18 atau awal abad ke – 19. Asal mula lahirnya gerakan feminisme sebagai upaya untuk menentang dominasi laki – laki yang menomorduakan perempuan sehingga perempuan kerap kali menjadi pihak yang sering terdiskriminasi, tertindas, dan diperlakukan tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di abad sebelumnya sudah dalam kondisi tidak baik – baik saja. Kondisi inilah yang kemudian secara sistematis telah melahirkan gerakan upaya memberontak dari perempuan, yaitu feminisme. Menurut Hodgson – Wright (2006) perjuangan feminisme awal melalui tiga cara (Komang & Suwastini, 2013). Pertama melalui usaha untuk merevisi esensi subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Kedua, menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. Ketiga, membangun solidaritas antar penulis perempuan yang kemudian membangkitkan kepercayaan diri dan dukungan finansial di kalangan penulis perempuan.

Menurut A. Teeuw yang merupakan seorang ahli sastra dan budaya Indonesia asal Belanda, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong munculnya gerakan feminisme di dunia Barat (A. Teeuw dalam Aizid, 2024) :

- a) Mulai ditemukan dan dikembangkannya teknik kontrasepsi yang memungkinkan perempuan melepaskan diri dari kekuasaan laki – laki.
- b) Adanya radikalisasi politik sebagai akibat dari Perang Vietnam.
- c) Lahirnya gerakan – gerakan pembebasan dari ikatan – ikatan tradisional, seperti ikatan gereja, ikatan kulit hitam Amerika, ikatan mahasiswa, dan sebagainya.
- d) Munculnya sekularisasi di Barat, dimana kondisi ini membuat wibawa agama (gereja) menjadi menurun dalam berbagai hal.
- e) Perkembangan pendidikan yang secara khusus dinikmati perempuan.
- f) Adanya reaksi terhadap pendekatan sastra yang mengasingkan karya dari struktur sosial, seperti kritik baru dan strukturalisme
- g) Adanya ketidakpuasan terhadap teori dan praktik ideologi Marxisme Ortodoks.

Hal – hal tersebutlah yang memicu lahirnya gerakan feminisme di Barat pada akhir abad ke – 18. Pada intinya, gerakan feminisme lahir karena sebuah ketidakadilan dalam ranah sosial – politik yang menimpa perempuan di abad pertengahan. Budaya masyarakat pada abad pertengahan, terutama di Barat adalah patriarki. Patriarki merupakan suatu sistem yang terdiri dari struktur dan praktik sosial dimana laki – laki menindas, mengeksploitasi, dan mengontrol perempuan (Aizid, 2024). Sedangkan dalam ranah publik dikenal dengan istilah

patriarki publik, yaitu struktur yang mengontrol dan membatasi kekuasaan perempuan daripada laki – laki. Patriarki publik ini mengarah pada penindasan perempuan pada level ekonomi dan tempat kerja.

Gerakan feminisme lahir dalam tiga gelombang yaitu gelombang pertama di abad ke – 19 sampai awal abad ke – 20, gelombang kedua lahir pada pertengahan abad ke – 20, dan gelombang ketiga lahir pada akhir tahun 1980-an yang disebut sebagai post-feminisme. Berikut penjelasan dari masing – masing gelombang feminisme:

2.4.1.1. Feminisme Gelombang Pertama

Feminisme gelombang pertama bermula dari pemikiran Mary Wollstonecraft dalam karyanya yang berjudul *The Vindication of the Rights of Woman* ditahun 1792. Dalam karyanya tersebut Wollstonecraft memberikan pandangan kritisnya terhadap posisi kaum perempuan yang tidak sebertuntung laki – laki dalam mendapatkan hak – haknya di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, politik, kepemilikan, pekerjaan publik, dan sebagainya.

Feminisme gelombang pertama memfokuskan pada perjuangan untuk pengembangan intelektualitas perempuan. Wacana ini meliputi hak pendidikan yang setara dengan laki – laki. Hal ini dikarenakan perempuan pada masa itu mengalami pengekangan dalam hal pendidikan, sehingga mereka menjadi bodoh. Salah satu kriterianya adalah buta huruf, yang mana efek domino dari hal tersebut menyebabkan perempuan menjadi dikerdilkan hak – hak nya, terutama hal berpolitik dan ekonomi. Karena hak mereka dirampas, maka kemudian mereka pun

menjadi miskin dan tidak memiliki keahlian apapun. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu bidang garapan feminisme gelombang pertama.

Selain itu, feminisme gelombang pertama juga memperjuangkan hak – hak perempuan dibidang lain seperti hak kesetaraan hukum, hak pilih perempuan, hak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan penghapusan standar ganda gender (Aizid, 2024) Tujuan utama yang ingin dicapai oleh feminisme gelombang pertama sejatinya tidak muluk – muluk, yaitu agar perempuan dapat berkembang dan menjadi individu yang mandiri terutama secara finansial. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah, mengingat tradisi patriarki di abad pertengahan masih sangat kental.

Perjuangan Wollstonecraft selanjutnya dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill. Pasangan ini melanjutkan perjuangan Wollstonecraft dalam mengampanyekan kesetaraan perempuan dan laki – laki terutama di ranah publik. Maka, keduanya memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak – hak legal dalam pernikahan maupun perceraian, dimana di dalamnya termasuk hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian (Komang & Suwastini, 2013).

Feminisme gelombang pertama yang dimotori oleh Wollstonecraft melalui karyanya ini dapat dikatakan sangat sukses. Sebab, ia tidak hanya menginspirasi dan menyadarkan kaum perempuan di Eropa namun juga di Amerika. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas para perempuan di gelombang ini yang merangsang tumbuhnya kesadaran mengenai ketertindasan perempuan yang kemudian mendorong munculnya berbagai organisasi untuk membela nasib kaum perempuan.

Puncak dari kesuksesan tersebut membawa gerakan feminisme gelombang pertama sampai pada perjuangan untuk mengubah tatanan sosial, yaitu agar perempuan memiliki hak pilih yang sama dengan laki – laki dalam pemilu dan hal ini berhasil terwujud pada 1918 (Aizid, 2024).

Namun disamping keberhasilannya, gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan dari kelas menengah saja. Terutama perempuan yang memiliki intelektualitas tinggi. Sementara itu, gerakan mereka juga hanya ditujukan untuk isu – isu tertentu saja dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminisme yang lebih luas. Hanya perempuan kaya yang memiliki kesempatan untuk berkarir dan kehidupan domestik karena mereka mampu membayar pelayan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kritik yang paling mencolok adalah para feminis ini masih mengandalkan bantuan kau laki – laki untuk mencapai tujuan mereka (Komang & Suwastini, 2013).

2.4.1.2. Feminisme Gelombang Kedua

Feminisme gelombang kedua dimulai pada pertengahan abad ke – 20, tepatnya pada tahun 1960-an dan berlangsung selama 20 tahunan. Gerakan feminisme pada gelombang ini melanjutkan perjuangan feminisme gelombang pertama yang belum tercapai. Namun, pada gelombang kedua ini tidak lagi fokus pada pertanyaan – pertanyaan melakukan pergerakan politis sebagaimana feminisme gelombang pertama lakukan, melainkan lebih kepada mempertanyakan mengenai peranan gender (Aizid, 2024).

Feminisme gelombang kedua ditandai dengan terbitnya *The Feminine Mystique* karya Betty Friedan pada tahun 1963 yang menentang pencitraan

tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan rumah, yang mana ini merupakan bentuk pengerdilan dan pengerangkengan terhadap potensi dan bakat perempuan (Grady, 2018). Kemudian disusul dengan berdirinya *National Organization for Woman* (NOW) ditahun 1966 dan munculnya kelompok – kelompok *Conscious Raising* (CR) diakhir tahun 1960-an.

Feminisme gelombang kedua dikenal sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka. Tema besar dari gelombang kedua ini adalah “*Women’s Liberation*” yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis (Kolang & Suwastini, 2013). Gelombang ini muncul sebagai reaksi akibat ketidakpuasan perempuan atas diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama.

Feminisme gelombang kedua terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran feminisme liberal untuk aliran kanan dan feminisme radikal untuk aliran kiri. Di Amerika, aliran kanan cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki – laki. Aliran ini berada di bawah organisasi NOW (*National Organization for Women*) yang didirikan oleh Betty Freidan tahun 1966. Sedangkan, untuk aliran kiri yang bersifat lebih radikal muncul akibat reaksi para feminis yang merasa tidak terfasilitasi dalam feminisme liberal NOW karena adanya perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam.

Konsep utama dari aliran ini adalah “*consciousness raising*” dengan paham “*the personal is political*” (Komang & Suwastini, 2013). Paham ini percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada institusi – institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual. Menurut aliran radikal ini, perempuan dipaksa oleh patriarki untuk bersikap apolitis, mengalah, dan lemah lembut. Oleh karena itu, mereka menentang kontes – kontes kecantikan karena menganggap hal tersebut sebagai sarana untuk mencekoki perempuan dengan standar kecantikan yang melemahkan posisi perempuan.

Thornam (2006) menjelaskan bahwa salah satu ciri utama dari feminisme gelombang kedua baik di Inggris maupun di Amerika adalah usaha mereka untuk merumuskan teori yang mampu memayungi semua perjuangan feminis (Komang & Suwastini, 2013). Feminisme gelombang ini percaya bahwa satu – satunya jalan untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan adalah dengan mengubah perempuan itu sendiri. Freidan berpendapat bahwa untuk menjadi perempuan yang setara dengan laki – laki, maka perempuan harus dapat meninggalkan jebakan rumah tangga dan semua “*feminine mystique*” yang mengikat perempuan dalam membuatnya ter subordinasi. Selain itu, salah satu perjuangan feminisme gelombang kedua ini juga yaitu menuntut kesetaraan gaji antara pekerja perempuan dengan laki – laki, yang mana menurut para feminis disebabkan oleh adanya diskriminasi berdasarkan gender.

Feminisme gelombang kedua sebagai gerakan maupun ideologi terbilang cukup sukses. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1980-an dimana feminisme berhasil menyadarkan masyarakat dan mengubah sikap mereka terhadap peran gender.

Feminisme juga mencabut undang – undang yang diskriminatif terhadap perempuan, termasuk mengubah rasio jenis kelamin di institusi – institusi yang sebelumnya didominasi oleh laki – laki, serta melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Meskipun begitu, masih ada satu hal yang belum berhasil dicapai oleh feminisme gelombang kedua ini, yaitu gagalnya upaya ratifikasi Amandemen Persamaan Hak (*Equal Right Acts*).

2.4.1.3. Feminisme Gelombang Ketiga

Feminisme gelombang ketiga atau yang disebut juga sebagai post-feminisme mulai berkembang di akhir tahun 1980-an. Terdapat beberapa kritik yang menjadi latar belakang munculnya feminisme gelombang ketiga ini, salah satunya muncul rasa ketidakpuasan atas konsep yang dibawa oleh feminisme gelombang kedua yang cenderung bersifat rasis dan hanya mewakili perempuan kulit putih kelas menengah dan memarginalkan perempuan dari kelompok etnis dan kelas lain (Kolang & Suwastini, 2013). Hal inilah yang kemudian membuat feminisme gelombang kedua dianggap belum cukup menyuarakan isu “*sexual difference*”.

Feminisme gelombang ketiga merupakan persimpangan antara feminisme dan pascamodernisme. Oleh karena itu, feminisme ini disebut juga sebagai pascafeminisme (*post-feminism*). Terdapat tiga aliran feminisme dalam gelombang ini, yaitu feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, ekofeminisme. Feminisme gelombang ketiga juga merupakan gerakan dan ideologi yang menentang aliran falogosentris, yaitu ide – ide yang dikuasai oleh logika absolute yang dalam hal ini adalah laki – laki. Sehingga feminisme gelombang

ketiga mencoba untuk mengarahkan kembali feminisme kepada jalan yang seharusnya.

Meskipun begitu, sebutan post-feminism pada gelombang ketiga ini menuai banyak kritik dari beberapa ahli. Beberapa tokoh Barat yang menolak istilah ini dan lebih memilih menggunakan istilah feminisme gelombang ketiga atau feminisme kultural adalah Gamble dan Tong. Gamble menyerukan penggunaan feminisme gelombang ketiga dan menolak penggunaan istilah pascafeminisme. Sedangkan, Tong justru menolak penggunaan pascafeminisme dan memilih untuk menggunakan istilah feminisme kultural.

Berbeda dengan feminisme gelombang kedua yang cenderung menyuarakan mengenai kesetaraan gender, feminisme gelombang ketiga ini justru menuntut mengenai pembedaan gender. Feminisme gelombang ketiga cenderung memberikan perhatian pada perbedaan antara kaum perempuan dalam upayanya untuk melanjutkan dan mengevaluasi kembali isu – isu yang diperjuangkan dalam gelombang kedua. Isu perbedaan ini lebih membahas mengenai keberadaan perempuan dan pengalamannya dalam banyak situasi berbeda dari pengalaman laki – laki. Inilah yang kemudian menjadi perhatian feminisme kultural. Dengan demikian, feminisme gelombang ketiga ini mempersoalkan variasi pengalaman perempuan terkait dengan perbedaan, ketidaksamaan, dan penindasan sesuai dengan lokasi sosial mereka.

Kesimpulannya, feminisme gelombang ketiga ini berupaya untuk menyuarakan yang tidak tersuarakan oleh feminisme gelombang kedua, terutama dalam ranah rasisme. Melalui konsep – konsep postmodern dalam feminisme

gelombang ketiga ini, banyak suara yang tadinya terpinggirkan mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan diri dan didengar. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak aliran yang turut mewarnai era feminisme gelombang ketiga ini. Selain itu, keberhasilan dari feminisme gelombang ini juga turut terbantu dengan hadirnya media dan popularitas artis – artis televisi yang turut mempopulerkan gerakan ini.

2.4.2. Perkembangan Feminisme di Indonesia

Feminisme di Indonesia dimulai sejak masa pra-kemerdekaan dengan beberapa tokoh yang terlibat, antara lain R.A.Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dhien. Meskipun mereka merupakan tokoh feminisme yang berasal dari kalangan atas, namun mereka tetap untuk kesetaraan perempuan di lingkungannya.

Gerakan feminisme di Indonesia baru mendapatkan legitimasinya pada era pemerintahan Orde Lama, dimana Presiden Soekarno memberikan peluang dan kesempatan pada gerakan feminisme Indonesia dengan memberikan pengajaran mengenai keperempuanan dan perjuangan kaum perempuan. Sehingga munculah GERWANI atau Gerakan Wanita Indonesia yang menjadi gerakan feminisme pertama di Indonesia dengan mengusung isu – isu yang berkaitan dengan perempuan.

Tidak hanya menyuarakan isu perempuan, sebagai salah satu gerakan wanita terbesar di Indonesia di tahun 1965, GERWANI juga turut aktif dalam bidang politik untuk menjembatani antara politik dan kebutuhan sosial perempuan. Selain GERWANI, ada juga beberapa organisasi perempuan yang turut memeriahkan perjuangan perempuan di awal kemerdekaan. Organisasi tersebut antara lain Aisyah, yaitu gerakan perempuan yang didirikan oleh Muhammadiyah.

Keduanya telah menjadi organisasi perempuan yang paling masif dan agresif pada waktu itu.

Namun di era Orde Baru, GERWANI justru mendapatkan citra yang buruk oleh para penguasa dengan dikaitkan pada pembunuhan tujuh jenderal oleh PKI. Hal ini merupakan sebuah mitos yang diletakan pada gerakan perempuan paling agresif di Indonesia tersebut. Di era Orde Baru, perempuan juga dikembalikan pada kodratnya sebagai individu domestik. Perempuan kembali diposisikan pada posisi nomor dua di bawah laki – laki. Kemudian, kebijakan inilah yang menghancurkan gerakan perempuan yang sudah muncul sebelumnya dan menghalangi tumbuhnya feminisme di Indonesia.

Gerakan feminisme kembali mendapatkan legitimasinya setelah Rezim Orde Baru lengser dan berganti ke era reformasi. Di era reformasi ini, usaha – usaha untuk memunculkan kembali gerakan feminisme semakin kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Di era ini pula feminisme bukan hanya sekedar wacana, melainkan terwujud ke dalam berbagai langkah instrumental pada struktur pemerintahan. Feminisme di era reformasi berkembang sangat pesat melalui gagasan seputar kesetaraan gender.

Hingga saat ini, gerakan feminisme terus berkembang dengan pesat dalam memperjuangkan hak – hak perempuan. Beberapa isu yang menjadi fokus feminisme saat ini antara lain diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan persamaan hak. Gerakan feminisme di Indonesia merupakan suatu gerakan transformasi perempuan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia secara lebih adil. Gerakan ini bukanlah suatu bentuk perlawanan terhadap suatu sistem

yang dianggap tidak adil, namun lebih kepada suatu gerakan transformasi sosial luas sebagai bentuk penghapusan ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan dominasi.

2.5. Perkembangan Feminisme dan Neoliberalisme

Sejak akhir dekade 1970-an, sistem kapitalisme yang berbasis pada intervensi negara mulai mengalami kemunduran. Negara – negara yang menganut model negara sejahtera (*welfare state*) mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan sistem tersebut karena meningkatnya beban pembiayaan, terutama untuk jaminan sosial, kesehatan, dan pensiun (Mudzakir, 2021). Hal ini kemudian diperparah dengan perubahan struktur demografi negara – negara Barat, yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lansia (*ageing society*), sehingga angka kerja produktif semakin sedikit sementara kebutuhan akan pelayanan sosial semakin meningkat tajam. Disaat yang bersamaan, embargo minyak yang dilakukan oleh negara – negara anggota *The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries* (OAPEC) terhadap Amerika Serikat dan sekutunya menyebabkan lonjakan harga energi dan krisis ekonomi global, yang mendorong banyak negara untuk melakukan deregulasi dan liberalisasi pasar. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap efektivitas intervensi negara dalam mengatur perekonomian melemah, dan kemudian digantikan oleh dominasi neoliberalisme—sebuah paradigma ekonomi yang menekankan pada privatisasi, efisiensi pasar, dan peran minimal negara (Mudzakir, 2021). Neoliberalisme dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing di tengah ketidakstabilan global yang meluas pada saat itu.

Salah satu karakteristik utama dari neoliberalisme adalah pergeseran kontrol ekonomi dari negara kepada mekanisme pasar yang semakin didominasi oleh dinamika pasar finansial yang tidak stabil (Mudzakkir, 2021). Dalam kerangka ini, banyak negara menerapkan program penyesuaian struktural yang mengarah pada pengurangan peran negara dalam penyediaan layanan publik. Tanggung jawab atas program kesejahteraan pun berangsur dialihkan kepada sektor swasta atau individu itu sendiri. Situasi ini mendorong pemerintah untuk membuka akses ekonomi secara luas kepada kekuatan pasar. Akibatnya, kebijakan privatisasi dan deregulasi diberlakukan secara masif. Seluruh proses ini dibungkus dalam wacana besar demokrasi dan hak asasi manusia, yang menjadi legitimasi global atas perubahan-perubahan ekonomi dan politik yang terjadi. Berlandaskan pada pandangan liberal mengenai kemandirian individu, negara yang menganut neoliberalisme membangun pemahaman bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya sendiri.

Perubahan dari kapitalisme yang dikelola oleh negara ke neoliberalisme bersamaan dengan kebangkitan gejala politik identitas, disebut sebagai kondisi pasca-sosialis. Dalam situasi ini, imajinasi feminis pun mengalami perubahan dari yang awalnya isu redistribusi menjadi rekognisi dimana memberikan peluang bagi gerakan feminis untuk mengatasi berbagai hambatan yang sebelumnya membatasi gerak mereka, seperti dominasi ekonomi (ekonomisme), sudut pandang laki – laki sebagai pusat (androsentrisme), kontrol negara yang berlebihan (etatisme), serta pendekatan bangsa tradisional (westphalianisme) (Mudzakkir, 2021).

Dalam fase ini, terjadi interaksi yang semakin erat antara gagasan feminisme dan postmodernisme, yang kemudian melahirkan analisis gender yang menekankan pada keberagaman budaya. Meskipun pendekatan ini memperkaya perspektif dalam memahami kompleksitas budaya, namun menurut Nancy Fraser yang merupakan seorang feminis sosialis dan teoritikus kritis hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian Fraser, karena menurutnya pendekatan ini secara tidak langsung turut memperkuat legitimasi neoliberalisme, suatu sistem yang dalam banyak aspek justru dapat merugikan perjuangan keadilan gender (Mudzakkir, 2021).

Menurut Fraser, feminisme menghadapi jalan buntu di bawah rezim neoliberal karena kritiknya yang sebelumnya mereka tujuikan terhadap empat elemen dalam kapitalisme negara telah mengalami “resignifikasi” atau pemaknaan ulang. Kritik tersebut justru diadopsi oleh neoliberalisme dan digunakan untuk membenarkan keberadaan serta logika neoliberal itu sendiri. Dalam konteks ini, feminisme dan neoliberalis berada dalam “relasi yang berbahaya”. Oleh karena itu Fraser secara tegas menyebutkan bahwa feminisme kontemporer sebagai “pelayan perempuan” neoliberalisme.

Resignifikasi kritik feminisme oleh neoliberalisme sebagaimana yang disinggung oleh Fraser sebagai berikut. Pertama, resignifikasi anti – ekonomis. Kritik feminis terhadap ekonomisme yakni pandangan bahwa pembangunan hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi justru dimanfaatkan oleh neoliberalisme untuk menggeser fokus perjuangan dari isu-isu sosial dan ekonomi menuju isu-isu identitas. Kedua, resignifikasi anti – andosentrisme. Kritik feminis terhadap

andosentrisme justru dimanfaatkan oleh neoliberalisme sebaagai pembenaran untuk memperluas akumulasi modal, antara lain dengan membuka lapangan kerja secara masif bagi perempuan sebagai buruh upahan. Ketiga, resignifikasi anti-etatisme. Kritik feminis terhadap etatisme atau paternalisme justru dibalikkan penggunaanya oleh neoliberalisme untuk melemahkan agenda negara kesejahteraan. Dengan memanfaatkan konsep “negara pembantu”, para perancang pembangunan neoliberal justru menekankan pentingnya kewirausahaan serta pembangunan proyek – proyek kredit mikro. Keempat, resignifikasi pro-kontra Westphalianisme yang ditujukan untuk melegitimasi kepentingan nasional.

Pergeseran dari kapitalisme yang dikelola negara menuju neoliberalisme membawa dampak yang beragam dalam wacana feminis di berbagai tempat. Di negara-negara Dunia Pertama, perubahan ini terlihat dari melemahnya pengaruh ide-ide sosial demokrasi di kalangan feminis, yang kemudian digantikan oleh munculnya berbagai bentuk pendekatan *Jalan Ketiga (The Third Way)*. Jika sebelumnya sosial demokrasi menekankan pentingnya redistribusi ekonomi, maka feminisme *Jalan Ketiga* justru mengakomodasi fleksibilitas pasar kerja ala neoliberalisme, sembari tetap mempertahankan citra politik yang progresif. Dalam kerangka ini, para feminis tidak lagi terfokus pada upaya mengurangi ketimpangan ekonomi, melainkan lebih memilih untuk mengadvokasi isu-isu seputar anti-diskriminasi dan multikulturalisme sebagai strategi untuk mengatasi hierarki status dalam masyarakat (Mudzakkir, 2021).

Sementara di negara Dunia Ketiga, berakhirnya erang Dingin menjadi latar penting bagi munculnya politik rekognisi yang juga memengaruhi gerakan feminis.

Runtuhnya ketegangan antara blok Barat yang dipimpin AS dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet menyebabkan berkurangnya aliran bantuan ke negara-negara berkembang. Konsekuensinya adalah pengurangan besar-besaran terhadap proyek-proyek redistribusi yang bersifat egaliter. Dalam konteks ini politik identitas bangkit, sering kali dalam bentuk aspirasi komunal yang bersifat otoriter. Gerakan feminis pun menghadapi tantangan berat: di satu sisi kapasitas negara untuk mendukung kebijakan sosial semakin lemah, namun di sisi lain muncul penguatan chauvinisme berbasis komunitas yang justru mempersempit ruang perjuangan mereka (Mudzakkir, 2021).

2.6. Organisasi Kesetaraan Gender di Indonesia

Saat ini, organisasi-organisasi perempuan di Indonesia hadir dalam beragam bentuk dan fokus isu yang berbeda-beda. Ada yang menaruh perhatian pada pemberdayaan ekonomi, ada yang fokus pada pendidikan, perlindungan hukum, kesehatan reproduksi, hingga penanganan kekerasan berbasis gender. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan di berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Meski memiliki pendekatan dan area kerja yang berbeda, seluruh organisasi tersebut memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memperjuangkan keadilan gender dan memastikan hak-hak perempuan dihormati, dilindungi, serta dipenuhi di semua lini kehidupan. Berikut beberapa contoh organisasi yang bergerak untuk membela perempuan di Indonesia :

1. Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan sebuah satuan kerja dari Komnas HAM yang

bersifat independen dan berfokus pada penegakan hak asasi manusia terutama perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan secara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang selanjutnya diperkuat landasan hukumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Aturan ini memberikan legitimasi yang lebih kokoh terhadap peran dan fungsi Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang berfokus dengan isu – isu kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari pembentukan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara, antara dorongan reformasi yang dipengaruhi pendekatan neo-liberal, tuntutan transisi untuk mendukung agenda tertentu, kebutuhan untuk mempercepat proses demokratisasi, upaya membangun citra positif pemerintah, meredam konflik antara negara dan masyarakat, kekecewaan terhadap lembaga negara sebelumnya, dorongan untuk meningkatkan efektivitas dalam bidang tertentu, serta proses legislasi yang tergesa – gesa (Rentika et al., 2023).

Lahirnya Komnas Perempuan karena adanya tuntutan dari masyarakat terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi serta menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan ini berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dari etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia perempuan memiliki tujuan utama, yaitu mengembangkan kondisi yang

kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak – hak asasi manusia perempuan di Indonesia serta untuk meningkatkan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, Komnas Perempuan setiap tahunnya merilis sebuah catatan tahunan (CATAHU) yang merupakan dokumen khusus yang berisi berbagai kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional. CATAHU bukan hanya menjadi acuan untuk melihat tren peningkatan atau penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga berperan sebagai dokumen referensi penting dalam pengembangan pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender. Selain itu, CATAHU turut mendorong pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Meskipun lembaga ini kerap dijadikan contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan memperkuat mekanisme hak asasi manusia untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, namun terdapat beberapa kendala yang dialaminya. Komnas Perempuan menghadapi keterbatasan dalam menjangkau perempuan korban kekerasan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia, mengingat keberadaan kantornya yang hanya terpusat di Jakarta. Dari sisi sumber daya manusia, lembaga ini hanya didukung oleh 45 badan pekerja, jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan beban tugas yang harus diemban. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan signifikan, karena tidak sebanding dengan cakupan

kerja yang luas. Dasar hukum pendiriannya pun dinilai belum cukup kuat, karena hanya didasarkan pada Peraturan Presiden (Rentika et al., 2023).

2. Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) didirikan pada 18 Mei 1998 oleh sekelompok aktivis perempuan di Jakarta dari berbagai daerah, dimana aksi ini bagian dari gerakan reformasi yang dirujukan untuk menurunkan Soeharto. KPI kemudian dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia pada 19 Desember 1998 di Yogyakarta. KPI sendiri merupakan suatu organisasi yang memeperjuangkan keadilan dan demokrasi yang berpegang teguh pada nilai prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudaraan, kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non secretarian, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat – rakyat kecil yang tertindas, serta organsiasi yang menolak segala bentuk diskriminasi (Aprianto et al., 2024).

Koalisi Perempuan Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Dalam rangka mewujudkan visinya tersebut KPI memiliki misi menjadi agen perubahan yang membela hak – hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan, menjadi kelompok pendukung sesama perempuan, pemberdaya hak politik perempuan, motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu, serta menjadi kemlompok pengkaji, pengusul, dan penekan untuk perubahan kebijakan.

Melalui kerja sama dengan program MAMPU (*Australisa – Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment*) Koalisi Perempuan Indonesia telah bekerja di 8 provinsi, 30 kabupaten, dan 78 desa/kelurahan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program – program perlindungan sosial. Melalui kemitraan ini juga, KPI telah berhasil menjalankan berbagai macam program advokasi dan penguatan kapasitas perempuan, termasuk membentuk dan mendampingi kelompok – kelompok perempuan di tingkat komunitas agar mampu menyuarakan hak – haknya dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat suara perempuan dalam kebijakan dan pelayanan publik yang responsif gender, serta mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Yayasan Kesehatan Perempuan

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) merupakan sebuah lembaga sosial yang didirikan pada 19 Juni 2001 di Jakarta oleh para aktivis yang peduli dengan kondisi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. YKP mengembangkan pendektan yang terencana dan terarah, dengan fokus utama pada upaya pemenuhan hak – hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan seksual yang hingga kini masih sering terabaikan (Sumber : Website YKP).

Yayasan Kesehatan Perempuan memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia dimana setiap perempuan terpenuhi hak – hak kesehatannya, khususnya hak reproduksi dan seksualitas tanpa diskriminasi,

serta bebas dari perlakuan buruk, tekanan, kekerasan, kesakitan, dan kematian. Untuk mendukung visi tersebut YKP memiliki beberapa misi antara lain mengupayakan terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan untuk menikmati hak seksualitas dan reproduksinya sebagai bagian dari HAM, memastikan terjangkau layanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan komprehensif tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran kritis mengenai hak reproduksi dan seksualitas, memperkuat dan memperluas kerja kolaboratif lintas sektor untuk mewujudkan hak kesehatan reproduksi yang komprehensi, dan memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan YKP agar terus dapat menjadi organisasi yang efektif dengan tata kelola yang baik.